

**KEBERADAAN HAK ANGKET DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI  
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP  
PEMERINTAH**

**ANDI IPPEH / D 101 08 384**

**ABSTRAK**

*Penelitian ini berjudul Keberadaan Hak Angket Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah, dengan Rumusan masalah bagaimanakah Pelaksanaan Hak Angket Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah. Tujuan dari Penelitian ini Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.*

*Hasil penelitan menunjukkan bahwa salah fungsi DPR ialah fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah, namun pada kenyataannya bagaimana DPR menajalankan fungsi pengawasannya dengan baik karna rendahnya evektivitas melalui rapat-rapat, aspirasi masyarakat/konstituen pada saat anggota melakukan pengawasan ke daerah tertentu (kunjungan kerja) seringkali tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan DPR belum efektif menjalankan tugas dan fungsi check and balances. Salah satunya kasus hak angket century yang sampai saat ini belum selesai yang merupakan tugas DPR.*

**Kata Kunci : Hak Angket, DPR**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Reformasi ketatanegaraan melalui perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah membawa implikasi yang luas penyelenggaraan Pemerintah terutama terhadap lembaga-lembaga Negara khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Salah satunya adalah penguatan pada ketiga fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penetapan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN).

Pada rumusan pasal 20A ayat (1), yang menyatakan DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sejalan dengan penegasan ini, pada fungsi legislasi lahirlah ketentuan Pasal 20 ayat (1) dengan rumusan yaitu DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sementara untuk memperkuat fungsi pengawasan, ketentuan Pasal 20A ayat (1) dilanjutkan dengan pasal berikutnya, yaitu

Pasal 20A ayat (2), bahwa dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Penguatan fungsi pengawasan DPR sekaligus membatasi kebijakan yang sebelumnya menjadi hak prerogatif presiden.

Secara umum, implikasi dari hasil perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan, kalau sebelumnya dominasi eksekutif sangat kuat (*executive heavy*), sebaliknya pada saat ini ada kecenderungan kuatnya lembaga perwakilan rakyat (*legislative heavy*). Kita menyampaikan penghargaan dan acungan jempol kepada DPR, yang pada era reformasi ini telah dengan sungguh-sungguh menggunakan hak-hak yang dijamin konstitusi. Selama ini DPR, terutama pada era orde baru, sangat kurang tanggap terhadap kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan semakin kuatnya

DPR melaksanakan fungsi pengawasan, maka akan tercipta keadaan seimbang antara kekuatan eksekutif dan legislatif.<sup>1</sup>

Namun yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana DPR, terutama DPR periode 2004-2009 ini melaksanakan kekuasaannya tersebut? dari laporan tim kajian peningkatan kinerja DPR RI pada 2006 sampai pada 3 (tiga) kesimpulan kinerja DPR dibidang pengawasan, yaitu : Pertama rendahnya efektivitas melalui rapat-rapat. Kedua aspirasi masyarakat/konstituen pada saat anggota melakukan pengawasan ke daerah tertentu (kunjungan kerja) seringkali tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan ketiga adalah DPR RI belum efektif menjalankan tugas dan fungsi check and balances. Sebagai study kasus yang terjadi pada pemerintahan SBY jilid 2 yang belum menemui titik terang yaitu kasus *angket bailout Bank Century*. Terkait dengan kasus ini fungsi pengawasan DPR terhadap Pemerintah yang dinilai tidak menghasilkan hal yang positif, dalam mewujudkan fungsi pengawasan pemerintahan terhadap pemerintah yang efektif, menimbulkan tanda tanya dimasyarakat tentang keseriusan DPR sebagai representasi rakyat dalam menjalankan fungsinya.

### **B. Rumusan Masalah**

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas secara singkat Bagaimanakah Keberadaan hak angket dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Hak Angket**

Hak angket (*enquete*) ialah hak mengadakan penelitian terhadap suatu hal atau khusus. Penelitian atau penyelidikan diadakan dengan tidak ikut campurnya pemerintah. Sebelum mengadakan angket, parlemen harus mengadakan ketentuan mengenai maksud penelitian itu lalu membentuk panitia peneliti (*panitia angket*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Bari Azed, *Percikan Pemikiran Tentang Hukum dan Demokrasi*, Pusat Kajian Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2001, hlm.15.

<sup>2</sup>M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

Panitia ini berhak meneliti dan meminta keterangan kepada semua pihak yang dirasa perlu, baik umum maupun instansi pemerintah, atau instansi kementerian khususnya. Hasil penelitian dilaporkan oleh Panitia kepada parlemen dan diumumkan. Hak angket biasa dilakukan umpamanya untuk meneliti nasib buruh di pabrik-pabrik, bahaya kelaparan, bencana alam, korupsi, kekacauan, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Di masa berjalannya DPR Sementara di bawah UUD 1950, tercatat adanya angket sebanyak 1 buah dan telah disetujui dan selesai dibicarakan. Di masa DPR hasil Pemilu 1955, tercatat 1 usul angket. Beberapa Sarjana mengatakan bahwa: "Dalam hak budget, juga terdapat sifat pengawasan, sebagai hak perlemen terhadap pemerintah." Kami dapat menyetujui pendapat ini, mengingat bahwa dengan ikut sertanya DPR mengolah RUU yang akan diterapkan sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran negara, berarti DPR secara langsung turut meneliti dan membenarkan sejauh mana pihak pemerintah eksekutif dapat berbuat dibidang tersebut, sedangkan bidang yang dimaksud adalah menyangkut dengan beban rakyat, misalnya perpajakan.<sup>4</sup>

Ketua Parlemen Mr. Sartono, dalam rapat istimewa DPR pada tanggal 15 Februari 1960, mengemukakan catatan, bahwa selama 10 tahun parlemen ( antara 15 Februari 1950 – 15 Februari 1960 ), parlemen telah menyelesaikan 287 UU usul pemerintah, dan 2 buah UU usul inisiatif DPR, semuanya 296 UU, menerima dengan baik 40 mosi, 2 resolusi, dan 2 pernyataan pendapat, mengadakan interpellasi 20 kali dan mengadakan angket 2 kali. Kami kemukakan contoh ini karena dalam 10 tahun yang dimaksud, sebagian besar diisi dengan sistem parlementer di bawah UUD 1950, hak-hak perlementerisme mengenai praktek kabinet ministrial dan liberalisme parlementer.

Dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak ada ketentuan atau aturan hukum yang dengan tegas mengatur ada tidaknya hak-hak yang

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm.88.

kita perkatakan di atas, kecuali hak inisiatif dan sekedar gambaran mengenai hak amandemen sebagaimana telah kami sebut dalam uraian yang lalu. Namun demikian, pendapat umum mengatakan bahwa: “Berdasarkan bunyi Pasal UUD ini beserta bunyi penjelasannya, UUD NRI Tahun 1945 tidak mengenal posisi sebagaimana terdapat dalam sistem UUD 1950.” Namun umumnya berpendapat adanya hak DPR untuk mengoreksi Pemerintah eksekutif ( kabinet ), sebagai partner dalam pelaksanaan pemerintahan, menunjang suksesnya Kabinet atau Menteri-menteri membantu pelaksanaan peranan dan tanggung jawab Presiden selaku mendataris MPR, sesuai dengan pokok-pokok kebijaksanaan politik yang digariskan oleh MPR.<sup>5</sup>

### **B. Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat**

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum bukanlah negara kekuasaan, dalam negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara<sup>6</sup>.

Adapun ciri negara hukum yaitu:

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pemisahan kekuasaan;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat.

Pengawasan merupakan suatu fungsi dalam mengevaluasi, mengoreksi suatu pekerjaan agar tercapai maksud dan tujuan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan dalam ilmu pemerintahan mempunyai arti dan ruang lingkup sangat luas.

DPR sebagai lembaga legislatif merupakan salah satu cabang kekuasaan. Dalam teori trias politika Fungsi pengawasan DPR sesungguhnya bentuk interaksi antara dua lembaga Negara pemegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sesuai

filosofi dasar dari keberadaan tiga kekuasaan dalam pemerintahan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif, maka esensi dari interaksi antara eksekutif dan legislatif melalui fungsi pengawasan haruslah ditempatkan dalam bingkai mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>7</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Bab VII Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 19 ayat (1) menentukan bahwa susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Berdasarkan perubahan kedua UUD NRI tahun 1945, ketentuan pasal 19 yang berisi dua ayat diubah menjadi terdiri atas tiga ayat yaitu : “(1) anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. (2) susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.”

Selanjutnya Pasal 20 berdasarkan perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari 5 ayat yang sebelum perubahan terdiri dari 4 ayat, adapun rumusan ke 5 ayat pasal 20 setelah perubahan ke2 UUD NRI Tahun 1945 yaitu :

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang –undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang tidak boleh dimajukan lagi

---

<sup>5</sup>Ibid

<sup>6</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Graffika, Jakarta 2010, hlm.27.

---

<sup>7</sup>Dasril Radjab, *Hukum Tatanegara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 2005, hlm. 97.

dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Selain itu, dalam perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945, ditambah lagi ketentuan pasal 20A yang berisi 4 ayat sebagai berikut:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, Dewan Perwakilan rakyat mempunyai hak interplesi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pernyataan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Fungsi DPR mempunyai fungsi; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1), berhak memajukan rancangan undang-undang. Ketentuan ayat (1) ini, dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945, diperbaiki rumusannya menjadi: "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang." Ayat (2) Pasal ini lebih lanjut menyatakan, "Jika rancangan undang-undang itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat pada masa itu." Selanjutnya, Pasal 22B hasil perubahan kedua,

menentukan: "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang."

Di antara perubahan penting dalam rumusan di atas adalah terjadinya Pergeseran mendasar dalam fungsi legislatif dari tangan Presiden ketangan DPR. Semula dalam pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan ditentukan bahwa, "*Presiden pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR*" dan dalam pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa "*anggota-anggota DPR berhak memajukan rancangan undang-undang.*" Sekarang setelah perubahan pertama dan kedua UUD NRI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa "*DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang,*" dan Pasal 5 (1) menegaskan bahwa: "*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.*" Untuk memastikan kuatnya kedudukan DPR itu, dalam rangka perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 ditambahkan lagi ayat (5) yang menyatakan: "*Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah berlaku undang-undang dan wajib diundangkan.*"<sup>8</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat yaitu *Fungsi legislasi*, dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, *Fungsi anggaran*, dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, dan *Fungsi pengawasan*, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Selain fungsi DPR mempunyai beberapa hak yaitu Hak interplesi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada

---

<sup>8</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 156-158.

Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Hak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik dan Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

1. Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional
2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
3. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

### **C. Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat**

Berdasarkan Pasal 77 ayat (3) UU No. 27 tahun 2009 Hak Angket adalah Hak DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Angket berdasarkan UU tersebut haruslah diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. pengusulan ini harus memuat:

(a). Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan

undang-undang yang akan diselidiki; dan (b). Alasan penyelidikan. Usul tersebut menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir. Apabila usul ini diterima maka DPR akan membentuk panitia angket yang mempunyai kewenangan untuk memanggil dan melakukan penyelidikan terhadap pemerintah dan saksi, pakar, organisasi, profesi dan lain-lain. Ketika Panitia Angket sudah menyelesaikan tugasnya, semuanya akan tergantung pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap selama penyelidikan dan tergantung pula pada analisis Panitia Angket terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhasil diungkapkan. Kalau semua yang terungkap disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah sekitar masalah yang diangkat, menguntungkan rakyat, dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah tentu aman-aman saja.

Penyelidikan ini memang bukan penyelidikan sebagaimana tugas penyidik pro justitia dari aparat penegak hukum (misalnya kepolisian atau KPK) untuk menentukan suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan sehingga diperlukan penyidikan. Hak Angket berdasarkan UU tersebut haruslah diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. pengusulan ini harus memuat:<sup>9</sup>

- a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan
- b. Alasan penyelidikan.

Usul tersebut menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir. Apabila usul ini diterima maka DPR akan membentuk panitia angket yang

---

<sup>9</sup>Dikutip

dari, <http://idanswer.yahoo.com/question/index?qid=20091205234537AAphtM3>, di akses pada hari Kamis, 23 April 2013 pukul 15.00 Wita.



mempunyai kewenangan untuk memanggil dan melakukan penyelidikan terhadap pemerintah, dan saksi, pakar, organisasi profesi dan lain-lain. Ketika Panitia Angket sudah menyelesaikan tugasnya, semuanya akan tergantung pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap selama penyelidikan dan tergantung pula pada analisis Panitia Angket terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhasil diungkapkan. Jika penyelidikan yang dilakukan Panitia Angket menyimpulkan telah terjadi kebijakan yang merugikan negara, merugikan rakyat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi melanggar ketentuan UUD NRI Tahun 1945, laporan Panitia Angket harus disampaikan ke rapat paripurna DPR untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi sebelum laporan itu diputuskan untuk diterima atau ditolak, baik secara aklamasi maupun melalui pemungutan suara. Keputusan DPR tersebut disampaikan kepada Presiden.

Selanjutnya DPR dapat menindak lanjuti keputusan itu sesuai kewenangan DPR. Tindak lanjut atas keputusan DPR tentang penggunaan hak angket diatur dalam Pasal 184 ayat (1a) ialah menyampaikan "Hak Menyatakan Pendapat" atas keputusan hasil penyelidikan melalui penggunaan hak angket, atau langsung menggunakan ketentuan Pasal 184 ayat (1b) yakni Hak Menyatakan Pendapat untuk menduga bahwa "Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden". Penggunaan ketentuan pasal ini yang merupakan ketentuan yang bersumber dari ketentuan Pasal 7B ayat.<sup>10</sup> Hak Angket diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUDNRI Tahun 1945:

*"Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak*

*interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat."*

Ketentuan tersebut dielaborasi lebih lanjut dalam UU No. 27 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043). Pasal 77 ayat (3) UU No. 27 tahun 2009 menentukan bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Landasan untuk memahami peranan DPR dalam mengaktualisasikan aspirasi rakyat tidak lain merupakan perwujudan dari tiga fungsi utama dan strategis yang dimilikinya, yaitu di bidang perundang-undangan, di bidang anggaran, maupun di bidang pengawasan.<sup>12</sup>

Anggota DPR RI memiliki sejumlah hak yang melekat pada lembaga legislasi yang umumnya dikenal di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Hak itu diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan DPR sehari-hari. Pasal 8 dari Tata Tertib DPR yang menyatakan bahwa DPR mempunyai hak-hak tertentu Yaitu:

- a. Hak meminta keterangan kepada Presiden;
- b. Hak mengadakan penyelidikan;
- c. Hak untuk mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-undang;
- d. Hak untuk mengajukan pernyataan pendapat;

---

<sup>11</sup>Lihat

<http://facebook.com/topic.php?uid=16403684861&topic=13120>, di akses hari senin 19 maret 2013 jam 19.30 wita.

<sup>12</sup>Risalah sidang Dewan perwakilan Rakyat Indonesia (Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR RI Pada Sidang Tahunan MPR RI) Tahun Kelima 2003-2004, dikutip dari, <http://www.parlemen.net/privdoc/8bb6b3e7b567b459523def37c7c74819.pdf>.

---

<sup>10</sup>Loc.Cit

- e. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- f. Hak mengajukan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif.<sup>13</sup>

Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jauhkah hak-hak tersebut dapat diwujudkan oleh DPR di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari? Tentu saja, bagi mereka yang mengikuti arah kritikan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap DPR, akan melihat bahwa tidak jarang muncul kritikan yang bersifat sinis, terutama yang berasal dari kalangan aktivis, karena mereka dianggap tidak mampu mewujudkan hak-haknya, terutama yang menyangkut perwujudan dari hak-hak untuk mengajukan pertanyaan, hak untuk melakukan penyelidikan (hak angket), dan hak mengajukan RUU usul inisiatif. Ketiga jenis perwujudan hak inilah yang menjadi sumber gugatan terhadap DPR yang selama ini diajukan masyarakat. Banyaknya skandal korupsi dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan ketua MPR-RI 1999 s.d 2004, Amien Rais, bahkan mengatakan DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasannya demi membela kepentingan rakyat.<sup>14</sup>

Hal itu tercermin dari ketidak mampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus lumpur Lapindo, kasus *bailout bank century* dan banyak kasus lagi. Selain itu, DPR masih menyisakan pekerjaan yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. Buruknya kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidak puasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang

menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi oleh DPR. Banyaknya judicial review yang diajukan oleh masyarakat dalam menuntut keabsahan undang-undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat<sup>15</sup>.

Dalam konsep Trias Politika, di mana DPR RI berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.

UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU Parlemen) membatasi upaya penyelidikan melalui hak angket pada tiga hal yaitu kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. UU Parlemen dan Tata Tertib DPR juga mengatur mekanisme yang berbeda mengenai tindak lanjut penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut untuk tiga hal tersebut. Apabila DPR dalam rapat paripurna setelah menerima laporan dari Panitia Khusus (Pansus) menyetujui untuk menyatakan pendapatnya maka dalam penggunaan hak terkait kebijakan

---

<sup>13</sup> Affan Gafar, Politik Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 292.

<sup>14</sup> Risalah sidang Dewan perwakilan Rakyat Indonesia (Laporan Pelaksanaan Fungsi,

Tugas dan Wewenang DPR RI Pada Sidang Tahunan MPR RI) Op.Cit.

---

<sup>15</sup>Lihat

[http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat)  
.Di unduh hari selasa tanggal 22 januari 2013. Jam 09.00 wita.

pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa dan tindak lanjut hak interpelasi dan hak angket, maka DPR akan menyampaikan pendapatnya kepada Presiden. Seperti yang terjadi dalam kasus bailout century.

Kedudukan Panitia Angket DPR sesungguhnya sangatlah kuat dilihat dari sudut hukum. Dalam sistem parlementer, keberadaan panitia angket tidaklah otomatis bubar dengan pembubaran parlemen. Seperti kita maklum dalam sistem parlementer, Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen setiap waktu dan menentukan kapan akan diselenggarakan pemilihan umum. Meskipun parlemen dibubarkan, panitia angket terus bekerja sampai terbentuknya parlemen yang baru, yang akan menentukan nasib panitia angket itu. Dalam sistem presidensial, hal ini tidak mungkin terjadi, kecuali Presiden telah berubah menjadi diktator dengan membubarkan DPR.<sup>16</sup> Suatu hal yang dapat dijadikan sebagai pegangan dari ketentuan UU Nomor 6 Tahun 1954 yang relevan dengan situasi sekarang ialah, pekerjaan panitia angket dalam menyelesaikan kasus century yang terjadi dalam pemerintahan jilid 2 SBY ini.

Sekarang, apakah yang menjadi obyek untuk diselidiki oleh Panitia Angket yang diputuskan DPR soal Bank Century, kita hanya bisa geleng-geleng kepala, bahwa itu bisa terjadi dan terjadi di negara kita. Kita tidak habis pikir, bahwa ada orang-orang yang terhormat melakukan hal tersebut dan pemerintah seakan berupaya menutup-nutupi. Juga pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan hukum sepertinya mau dipergunakan untuk menutup-nutupi, namun bangsa ini bangsa ini tidak dapat dibodohi. Keadilan memang membutuhkan hukum namun hukum di Indonesia tidak selamanya memenuhi rasa keadilan. Ini bukan praduga, namun pengalaman, dan rasa keadilan tidak hanya dipenuhi oleh hukum tetapi juga oleh politik. Maka dari itu, tepat dalam hal ini bahwa DPR bertindak. Dalam kasus ini sebaiknya DPR didampingi oleh ahli hukum dan perbankan,

supaya dapat memformulasikan pertanyaan-pertanyaan yang jitu dan mengadakan analisis dan jawaban-jawaban secara tepat. Dan kalau DPR yang bertugas ini tidak dapat menyelesaikan hingga habis masa jabatannya, maka dilanjutkan oleh DPR hasil pemilu yang baru. Untuk menciptakan keadilan dan tertib sosial justru sangat diperlukan oleh rakyat kita. Sebab rakyat sudah semakin muak dengan berbagai pertikaian politik dan merindukan agar suasana aman dan tentram segera dibangun kembali.

Kita harus kembali kepada basis disiplin dimana mekanisme pemerintahan demokratis Indonesia. Organisasi birokrasi perlu ditata ulang sehingga memungkinkan otoritas sipil melaksanakan tugas administrasi kesejahteraan dan keamanan rakyat dalam satu kesatuan yang utuh. Dengan Organisasi yang bersifat "checks and balance" disemua tataran birokrasi maka isu-isu nasional seperti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan lain-lain akan teratasi dengan sistemik, bukan hingar-bingar penuh retorika semata-mata dengan mendirikan beraneka ragam badan-badan baru yang memboroskan dan diluar administrasi negara. Jika semua institusi pemerintah bekerja sesuai mekanisme Trias Politica secara praktis, yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif tersebut akan membawa kita lebih cepat mencapai Negara Republik Demokrasi Indonesia.<sup>17</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai filosofi dasar negara Indonesia dari keberadaan tiga kekuasaan dalam pemerintahan yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka esensi dari interaksi antara eksekutif dan legislatif melalui fungsi pengawasan haruslah ditempatkan dalam bingkai mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan. DPR sebagai lembaga legislatif yang merupakan salah satu cabang kekuasaan yang mempunyai fungsi pengawasan, dan DPR juga mempunyai

---

<sup>16</sup>Lihat <http://yusril.ihzamahendra.com/?p=250> diakses hari kamis 16 mei 2013, pukul 22.48 wita.

---

<sup>17</sup>Imam Anshori Saleh dan Jasim Hamidi, *memedekakan indonesia kembali*, IRCiSoD, Jogjakarta, 2004 hlm 95



hak yaitu Hak interpelasi, Hak Angket dan Menyatakan pendapat. UU No. 27 Tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan DPR, MPR, DPD dan DPRD memberikan batasan ruang lingkup pengawasan DPR, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap Undang-Undang, APBN, serta kebijakan pemerintah memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan mendapat, menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi rakyat, melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Bab VII Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 77 UU No. 27 Tahun 2009 Hak Angket adalah Hak DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan. Hak angket berdasarkan UU tersebut haruslah diusulkan paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

#### **B. Saran**

1. DPR sebagai wakil rakyat diparlemen seharusnya betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat, perlu dipertegas juga DPR harus meningkatkan pengawasannya terhadap pemerintah terutama masalah keuangan negara dan
2. Sekiranya DPR mampu menyelesaikan semua kasus-kasus yang menjadi tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Bari Azed, *Percikan Pemikiran Tentang Hukum dan Demokrasi*, Pusat Kajian Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2001.
- Affan Gafar, *Politik Indonesia*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2004.
- Dasril Radjab, *Hukum Tatanegara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Imam Anshori Saleh dan Jasim Hamidi, *memedekakan Indonesia kembali*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2004.
- Jimlly Asshiddiqie, *konstitusi dan kostitusionalisme indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Solly Lubis., *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

### C. Media Internet

- Dikutip dari, <http://idanswer.yahoo.com/question/index?qid=20091205234537AAphtM3>, di akses pada hari Kamis, 23 April 2013 pukul 15.00 Wita.
- Lihat <http://facebook.com/topic.php?uid=16403684861&topic=13120>, di akses hari Senin 19 Maret 2013 jam 19.30 wita
- Risalah sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPR RI Pada Sidang Tahunan MPR RI) Tahun Kelima 2003-2004, dikutip dari, <http://www.parlemen.net/privdoc/8bb6b3e7b567b459523def37c7c74819.pdf>

**BIODATA**

**ANDI IPPEH**, Lahir di Bambarimi, 08 Maret 1989, Alamat Rumah Jalan Abadi Nomor 04 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +62....., Alamat Email [andi\\_ippeh@yahoo.com](mailto:andi_ippeh@yahoo.com)

